

Kolaborasi Pemerintah Provinsi Riau, Kementerian Pariwisata, Dan Multi Stakeholder Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Collaboration Between The Riau Provincial Government, The Ministry Of Tourism, And Multi-Stakeholders In Increasing Regional Original Income

Dedeh Maryani^{a*}, Roni Rakhmat^b, Reza Fahlevi^c, Said Nur Syahdu^d, Muhammad Al Ikhsan^e

Sekolah Pascasarjana, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia^{a,b,c,d,e}
^adedehmaryani@ipdn.ac.id, ^ealikhshan23@gmail.com

Abstract

The tourism sector holds strategic potential in contributing to the Local Genuine Revenue (PAD) of Riau Province. However, optimizing this potential requires strong cross-sectoral coordination. This study aims to analyze the form of collaboration between the Riau Provincial Government, the Ministry of Tourism, and multi-stakeholders (academics, business actors, communities, and the media) in regional tourism development. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through literature study and observation of policy documents. The results indicate that the collaboration established through the pentahelix model has been able to increase tourist visits and the efficiency of tourist attraction management, which has a positive impact on increasing local levies and taxes. Nevertheless, obstacles remain in the form of regulatory synchronization issues between the central and regional governments, as well as limited supporting infrastructure. This study recommends the need to strengthen joint commitments in collaborative financing schemes to ensure the sustainability of PAD increases in the future.

Keywords: Collaboration, Riau Provincial Government, Ministry of Tourism, Multi-stakeholder, Local Genuine Revenue.

Abstrak

Sektor pariwisata memiliki potensi strategis dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau. Namun, optimalisasi potensi ini memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Riau, Kementerian Pariwisata, dan *multi-stakeholder* (akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media) dalam pengembangan pariwisata daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin melalui model *pentahelix* telah mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan efisiensi pengelolaan objek wisata, yang berdampak positif pada peningkatan retribusi dan pajak daerah. Meski demikian, masih terdapat hambatan berupa ketidaksinkronan regulasi antara pusat dan daerah serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan komitmen bersama dalam skema pembiayaan kolaboratif untuk menjamin keberlanjutan peningkatan PAD di masa depan.

Kata Kunci: Kolaborasi, Pemerintah Provinsi Riau, Kementerian Pariwisata, Multi-Stakeholder, PAD.

1. Pendahuluan

Sektor pariwisata merupakan salah satu pilar strategis dalam akselerasi pembangunan ekonomi nasional karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan memicu *multiplier effect* bagi sektor lainnya. Tidak hanya memberikan kontribusi langsung terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pariwisata juga berperan dalam membuka peluang investasi, memperkuat diplomasi budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Keunggulan pariwisata terletak pada sifatnya yang lintas sektor, yang memungkinkan integrasi dengan berbagai bidang seperti transportasi, perdagangan, pendidikan, dan

teknologi. Oleh karena itu, banyak negara menjadikan pariwisata sebagai motor utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Di tingkat regional, Provinsi Riau memiliki potensi pariwisata yang unik, mulai dari wisata religi, budaya, hingga ekowisata berbasis sungai dan hutan (Nasution & Siregar, 2021). Riau tidak hanya dikenal sebagai provinsi penghasil minyak dan sawit, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya Melayu yang otentik, warisan sejarah Islam yang kuat, serta ekosistem alam seperti hutan gambut dan sungai-sungai besar yang dapat dikembangkan menjadi destinasi ekowisata kelas dunia. Objek-objek wisata seperti Istana Siak, Festival Bakar Tongkang, Pulau Rupat, dan kawasan konservasi seperti Suaka Margasatwa Kerumutan dan Taman Nasional Zamrud menjadi bukti konkret potensi besar yang dimiliki Riau dalam hal daya tarik wisata.

Namun demikian, kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali belum mencapai titik maksimal akibat pengelolaan yang masih bersifat sektoral dan kurangnya integrasi antar lini. Di banyak daerah, termasuk Riau, pengelolaan pariwisata cenderung terfragmentasi ke dalam beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti dinas pariwisata, dinas perhubungan, dinas lingkungan hidup, dan dinas pekerjaan umum. Fragmentasi ini menyebabkan perencanaan pembangunan wisata tidak berjalan secara terpadu, sehingga berbagai kebijakan dan program yang diluncurkan cenderung tumpang tindih dan tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan maupun pendapatan daerah. Di sisi lain, masih lemahnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media turut memperparah stagnasi perkembangan sektor ini.

Peningkatan PAD melalui pariwisata memerlukan sinergi yang progresif dan terukur. Menurut Sari et al. (2022), ketergantungan pemerintah daerah pada transfer pusat harus mulai dikurangi dengan mengoptimalkan sumber daya lokal secara mandiri. Dalam konteks ini, penguatan sektor pariwisata menjadi langkah strategis karena sifatnya yang padat karya dan berbasis lokal. Namun, pemerintah daerah tidak dapat bergerak sendiri dalam mewujudkan hal tersebut. Kolaborasi antar level pemerintahan, khususnya antara Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Pariwisata, menjadi krusial untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata berjalan secara sinkron dan berorientasi pada hasil yang konkret. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, memiliki peran penting sebagai regulator kebijakan nasional yang mampu menyelaraskan program strategis pusat dengan kebutuhan daerah (Pratama, 2023). Tanpa adanya dukungan dari pusat, termasuk dalam hal promosi nasional dan internasional, pembangunan infrastruktur pariwisata, dan penyusunan standar kualitas layanan, maka inisiatif daerah akan sulit mencapai skala dan daya saing yang memadai.

Kolaborasi antara pusat dan daerah ini tidak boleh berhenti pada level koordinasi formal semata, melainkan harus diterjemahkan ke dalam aksi nyata yang terintegrasi. Misalnya, pengembangan destinasi wisata prioritas harus disertai dengan dukungan anggaran dari pusat, pendampingan teknis, serta promosi melalui jaringan diplomatik luar negeri. Demikian pula, pelatihan sumber daya manusia lokal harus menjadi bagian dari strategi pengembangan kawasan wisata agar masyarakat setempat benar-benar menjadi pelaku utama dan penerima manfaat dari kegiatan pariwisata. Dengan pendekatan semacam ini, pembangunan pariwisata akan menciptakan efek ganda yang signifikan terhadap PAD, kesempatan kerja, dan penguatan identitas budaya lokal.

Selain hubungan formal antar pemerintah (*Government to Government*), keterlibatan multi-*stakeholder* yang mencakup sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media—atau yang dikenal sebagai model Pentahelix—menjadi syarat mutlak keberhasilan destinasi (Wibowo, 2020). Model ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam membangun ekosistem pariwisata yang sehat dan berkelanjutan. Sektor swasta memiliki peran strategis dalam hal investasi, pengelolaan objek wisata, serta inovasi layanan berbasis digital. Akademisi dapat menyumbangkan pengetahuan melalui riset-riset destinasi, pengembangan SDM, dan penyusunan kebijakan berbasis data. Komunitas lokal berperan sebagai pelaku utama yang menjaga kearifan lokal, kebersihan lingkungan, dan kenyamanan pengunjung. Sementara media memiliki kekuatan dalam membentuk narasi, membangun citra destinasi, dan memperluas jangkauan promosi.

Sayangnya, penerapan model Pentahelix ini masih menemui banyak hambatan di lapangan, terutama di Provinsi Riau. Kesenjangan yang ditemukan saat ini adalah masih adanya ego sektoral dan hambatan birokrasi yang menghambat investasi di sektor pariwisata Riau (Hidayat & Saputra, 2021). Banyak pelaku usaha mengeluhkan proses perizinan yang berbelit, tidak adanya kepastian hukum dalam investasi jangka panjang, serta kurangnya fasilitas pendukung seperti insentif pajak, jaminan keamanan, dan keterbukaan informasi. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih bersifat pasif, karena mereka tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Akibatnya, banyak inisiatif wisata berbasis komunitas mengalami kegagalan karena tidak memiliki dukungan struktural yang memadai.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya promosi terpadu dan digitalisasi pariwisata di Riau. Banyak destinasi yang memiliki nilai sejarah dan keunikan budaya tinggi namun tidak dikenal oleh wisatawan karena ketiadaan sistem informasi yang mudah diakses. Di era teknologi digital, keberadaan platform reservasi daring, peta digital, sistem penilaian layanan, serta strategi pemasaran berbasis media sosial menjadi keharusan. Tanpa hal ini, Riau akan terus tertinggal dalam peta pariwisata nasional maupun internasional, meskipun memiliki potensi besar. Oleh karena itu, transformasi digital dalam sektor pariwisata harus menjadi bagian dari strategi utama pembangunan daerah.

Menyadari kompleksitas tantangan tersebut, maka diperlukan penelitian yang secara mendalam menganalisis bagaimana bentuk kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Riau, Kementerian Pariwisata, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang mampu mendongkrak PAD secara signifikan dan berkelanjutan. Penelitian semacam ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga strategis dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis kolaborasi lintas sektor dan lintas aktor. Dengan memahami dinamika hubungan antar pihak, hambatan-hambatan struktural, serta peluang yang dapat dimanfaatkan, maka strategi pengembangan pariwisata dapat dirumuskan secara lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, pembangunan sektor pariwisata di Provinsi Riau membutuhkan perubahan paradigma dari pendekatan birokratis-sentralistik menuju pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam merancang agenda-agenda pembangunan wisata. Di sisi lain, pemerintah pusat perlu lebih responsif dan adaptif terhadap aspirasi daerah, serta menyediakan dukungan nyata

baik dalam bentuk regulasi, anggaran, maupun promosi global. Melalui sinergi yang saling menguatkan ini, sektor pariwisata Riau memiliki peluang besar untuk menjadi sumber utama PAD sekaligus lokomotif pembangunan ekonomi yang berwawasan budaya dan lingkungan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*literature review*). Metode kualitatif deskriptif dipilih untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena kolaborasi yang diteliti (Sugiyono, 2019). Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi sinergi antara Pemerintah Provinsi Riau, Kementerian Pariwisata, dan *stakeholder* terkait dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pariwisata.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah. Sumber data mencakup: a) Jurnal Ilmiah: Artikel terkait *collaborative governance* dan strategi peningkatan PAD; b) Dokumen Resmi: Laporan tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Riau, data statistik BPS Riau, dan regulasi terkait pariwisata; c) Media Massa & Laporan Terpercaya: Informasi terkini mengenai proyek strategis pariwisata di Riau. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan instrumen studi pustaka. Peneliti melakukan *screening* terhadap literatur yang relevan dengan kata kunci "Kolaborasi Pemerintah," "Pentahelix," "Sektor Pariwisata Riau," dan "Pendapatan Asli Daerah" (Zed, 2014).

Data dianalisis menggunakan teknik Analisis Isi (*Content Analysis*) dengan tahapan sebagai berikut: a) Reduksi Data: Merangkum dan memilih data inti yang berkaitan dengan pola kolaborasi antar aktor; b) Penyajian Data (Data Display): Menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel perbandingan peran masing-masing *stakeholder*; c) Penarikan Kesimpulan: Menyimpulkan efektivitas kolaborasi terhadap peningkatan PAD Provinsi Riau (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

3. Hasil Dan Pembahasan

Dinamika Kolaborasi Pentahelix dalam Pariwisata Riau

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah mulai mengadopsi pendekatan kolaboratif berbasis model Pentahelix sebagai strategi utama dalam pengembangan sektor pariwisata. Model ini menjadi kerangka kerja utama dalam merumuskan kebijakan dan program yang bersifat multipihak, dengan melibatkan unsur-unsur penting seperti pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas lokal, dan media massa. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma baru dalam pembangunan daerah yang menekankan pentingnya partisipasi inklusif, inovasi lintas sektor, serta keberlanjutan ekonomi dan sosial. Dalam konteks Riau, adopsi model Pentahelix tidak hanya bersifat normatif sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPPARPROV) Riau, tetapi juga mulai diterapkan dalam berbagai program strategis di lapangan.

Dari sisi kelembagaan, Pemerintah Provinsi Riau bersama Dinas Pariwisata telah menunjukkan komitmen untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai mesin pertumbuhan baru, atau yang mereka sebut sebagai *engine of growth*, guna mengimbangi ketergantungan terhadap sektor migas dan kelapa sawit. Narasi ini

muncul dalam berbagai dokumen kebijakan daerah serta sambutan resmi kepala daerah dalam forum-forum pembangunan. Langkah ini mencerminkan kesadaran baru bahwa keberlanjutan ekonomi daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan komoditas ekspor yang bersifat ekstraktif, tetapi harus digeser menuju sektor yang lebih inklusif dan ramah lingkungan, seperti pariwisata.

Di tingkat operasional, dinamika kolaborasi antara lima unsur dalam Pentahelix mulai terlihat dalam berbagai bentuk kemitraan. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator utama melalui penyediaan infrastruktur dasar, penyusunan regulasi, serta penyediaan insentif untuk pelaku usaha. Misalnya, beberapa proyek pengembangan kawasan wisata seperti Pulau Rupat dan Bono di Sungai Kampar telah disiapkan dalam kerangka kerja sama lintas OPD dan mitra strategis. Dalam upaya mendorong investasi, pemerintah juga mulai mengintegrasikan data potensi wisata ke dalam sistem promosi digital dan membuka peluang kemitraan publik-swasta.

Sementara itu, keterlibatan akademisi dalam kolaborasi Pentahelix di Riau tampak dalam bentuk penyusunan kajian strategis, pelatihan sumber daya manusia, serta keterlibatan dalam perencanaan destinasi wisata prioritas. Sejumlah perguruan tinggi lokal seperti Universitas Riau dan Universitas Islam Riau aktif melakukan riset pariwisata berbasis kearifan lokal, serta mengembangkan kurikulum pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Peran akademisi tidak hanya penting dalam memberikan dasar ilmiah bagi pengambilan kebijakan, tetapi juga dalam menjembatani pemikiran strategis antara pemerintah dan masyarakat.

Pelaku usaha pariwisata, yang mencakup pemilik hotel, biro perjalanan, pengelola homestay, dan pelaku ekonomi kreatif, merupakan aktor penting yang menjadikan konsep kolaborasi ini menjadi nyata di lapangan. Di sejumlah destinasi, seperti Kota Pekanbaru, Siak, dan Rokan Hilir, pelaku usaha telah membentuk forum komunikasi sektor pariwisata sebagai wadah koordinasi dan advokasi terhadap kebijakan daerah. Namun demikian, dinamika partisipasi sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait insentif fiskal, kepastian hukum investasi, dan infrastruktur penunjang yang belum merata. Beberapa pelaku usaha mengeluhkan lambatnya proses perizinan dan kurangnya keterlibatan dalam tahap perencanaan destinasi, sehingga partisipasi mereka cenderung reaktif daripada proaktif.

Komunitas lokal memainkan peran ganda dalam dinamika ini. Di satu sisi, mereka merupakan penjaga otentisitas budaya dan kearifan lokal yang menjadi daya tarik utama pariwisata. Di sisi lain, mereka juga merupakan pelaku ekonomi yang diharapkan mampu mengambil manfaat langsung dari aktivitas wisata. Di beberapa wilayah seperti Rokan Hilir dan Siak, komunitas adat dan tokoh agama aktif terlibat dalam pelaksanaan event budaya seperti Festival Bakar Tongkang dan Festival Zapin. Keterlibatan ini menunjukkan adanya ruang partisipasi yang cukup terbuka, meskipun belum merata di seluruh kabupaten/kota. Tantangan yang masih dihadapi adalah soal pemberdayaan ekonomi komunitas, peningkatan kapasitas pelayanan wisata, serta pendampingan berkelanjutan agar keterlibatan mereka tidak bersifat simbolik semata.

Media, baik cetak, elektronik, maupun digital, memiliki peran sentral dalam membentuk persepsi dan opini publik tentang pariwisata Riau. Dalam beberapa tahun terakhir, narasi tentang wisata Riau mulai muncul dalam media nasional dan media daring lokal, terutama terkait dengan event budaya tahunan dan potensi wisata bahari. Dinas Pariwisata juga aktif menggunakan media sosial sebagai sarana promosi,

termasuk melalui kampanye digital dan pembuatan konten visual yang menarik. Namun demikian, pemanfaatan media sebagai mitra strategis masih bersifat satu arah dan belum terstruktur dalam bentuk kolaborasi jangka panjang. Peran media seharusnya tidak hanya dibatasi sebagai kanal informasi, tetapi juga sebagai aktor edukasi publik, pengawas kebijakan, dan fasilitator promosi partisipatif.

Meskipun model Pentahelix telah mulai diadopsi, hasil penelitian juga menemukan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi lintas aktor, distribusi peran, serta keberlanjutan kemitraan. Ego sektoral di tubuh birokrasi masih cukup kuat, sehingga sinkronisasi antar OPD dan antar level pemerintahan seringkali menjadi hambatan. Belum adanya platform kolaborasi yang formal dan terstruktur menyebabkan banyak inisiatif kolaboratif berjalan sporadis dan tergantung pada figur kepemimpinan tertentu. Padahal, keberhasilan kolaborasi multipihak sangat bergantung pada sistem kelembagaan yang mampu menjaga ritme komunikasi, pembagian peran yang adil, serta sistem monitoring dan evaluasi bersama.

Aspek lainnya yang muncul dari hasil pembahasan adalah perlunya regulasi daerah yang secara eksplisit mengatur mekanisme kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan pariwisata. Saat ini, kerangka kerja kolaborasi masih bersandar pada komitmen informal atau nota kesepahaman yang tidak selalu mengikat secara hukum. Dalam jangka panjang, dibutuhkan dasar hukum yang kuat, misalnya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur, yang menjabarkan prinsip-prinsip kolaborasi, tanggung jawab tiap aktor, serta indikator keberhasilan yang disepakati bersama.

Secara umum, dinamika kolaborasi Pentahelix dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Riau menunjukkan adanya kemajuan signifikan, namun masih berada dalam tahap konsolidasi. Kolaborasi ini telah membuka ruang dialog yang lebih luas antar aktor, memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya pengembangan pariwisata berbasis lokal, serta mendorong munculnya inisiatif-inisiatif baru dari sektor non-pemerintah. Namun demikian, efektivitas kolaborasi masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan, perencanaan partisipatif, dan sistem insentif yang adil bagi semua pihak. Tanpa upaya sistematis untuk memperkuat kolaborasi ini, maka potensi besar pariwisata Riau akan sulit dimaksimalkan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, hasil ini menegaskan bahwa kolaborasi Pentahelix bukan sekadar konsep teoretis, melainkan praktik pembangunan yang membutuhkan tata kelola yang inklusif dan berorientasi hasil. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada komitmen bersama, transparansi proses, serta kesediaan semua aktor untuk keluar dari sekat sektoral menuju sinergi yang produktif. Dalam konteks Provinsi Riau, model ini memberikan kerangka kerja yang menjanjikan dalam mewujudkan sektor pariwisata sebagai kekuatan ekonomi baru yang mandiri, berdaya saing, dan berbasis pada kearifan lokal.

Sinergi Pemerintah Pusat (Kemenparekraf) dan Daerah

Kolaborasi antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam sektor pariwisata menjadi elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola destinasi yang produktif, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Dalam kerangka otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah provinsi untuk menggali potensi lokal,

tetap diperlukan sinergi dengan pusat agar pembangunan pariwisata tidak berjalan secara terpisah, melainkan menyatu dalam agenda strategis nasional. Hal ini menjadi penting mengingat sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada pendapatan daerah (PAD), tetapi juga menyangkut posisi Indonesia dalam pasar pariwisata global, daya saing antardaerah, serta pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional.

Dalam konteks Provinsi Riau, Kemenparekraf memfokuskan kolaborasi pada tiga pilar utama, yaitu peningkatan aksesibilitas destinasi, penyelenggaraan event berskala nasional, serta peningkatan standar mutu dan kepercayaan wisatawan melalui sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability). Tiga pilar ini menjadi fondasi utama yang menopang strategi pengembangan pariwisata secara nasional, dan telah mulai diimplementasikan secara aktif di Riau dalam beberapa tahun terakhir.

Pilar pertama adalah peningkatan aksesibilitas destinasi wisata, terutama melalui dukungan revitalisasi dan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan potensial dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk nyata dari sinergi ini adalah dukungan terhadap pengembangan kawasan Ulu Kasok di Kampar yang mulai dikenal sebagai "Raja Ampat-nya Riau", serta revitalisasi kawasan heritage seperti Istana Siak di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Kemenparekraf memberikan dukungan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pariwisata yang ditransfer ke daerah untuk membiayai pembangunan fasilitas umum, dermaga wisata, jalur akses, dan pusat informasi pariwisata. Intervensi pusat ini sangat krusial karena banyak destinasi wisata di Riau memiliki potensi luar biasa namun terkendala oleh akses jalan yang buruk, kurangnya fasilitas parkir, atau minimnya papan informasi. Dalam konteks infrastruktur, sinergi antara pusat dan daerah juga mencakup harmonisasi perencanaan, di mana master plan pariwisata daerah harus selaras dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (Ripparnas) agar memperoleh dukungan teknis dan anggaran dari pusat.

Pilar kedua adalah penyelenggaraan event sebagai strategi promosi yang bersifat simultan dan berdaya jangkauan luas. Salah satu program utama Kemenparekraf dalam hal ini adalah *Kharisma Event Nusantara* (KEN), yaitu kalender event pariwisata nasional yang menyeleksi dan mempromosikan festival unggulan dari berbagai daerah di Indonesia. Festival Bakar Tongkang dari Rokan Hilir dan Pacu Jalur dari Kuantan Singingi menjadi dua event utama dari Riau yang berhasil masuk dalam KEN. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan eksposur nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan wisatawan domestik dan mancanegara secara signifikan. Data Dinas Pariwisata Riau menunjukkan bahwa selama pelaksanaan Festival Bakar Tongkang, terjadi peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 20–30 persen dibandingkan bulan biasa. Hal ini berdampak langsung terhadap sektor perhotelan, kuliner, transportasi, serta pelaku UMKM lokal.

Masuknya event-event tersebut dalam KEN merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyusun proposal event, meningkatkan kapasitas penyelenggara lokal, serta mengintegrasikan promosi dengan platform digital Kemenparekraf. Dalam jangka panjang, keikutsertaan dalam KEN memberikan efek domino, antara lain peningkatan citra destinasi, perpanjangan masa tinggal wisatawan, serta terbukanya peluang kerja sama lintas sektor seperti sponsorship, media partnership, dan kemitraan swasta. Selain Festival Bakar Tongkang dan Pacu Jalur, sejumlah event lain dari Riau juga mulai mendapatkan perhatian seperti Festival

Bono di Sungai Kampar, Festival Zapin, dan Perahu Baganduang, yang menjadi bagian dari strategi pariwisata berbasis budaya dan alam.

Pilar ketiga adalah pelaksanaan sertifikasi CHSE, yang menjadi program andalan Kemenparekraf selama masa pemulihan pasca-pandemi COVID-19. Sertifikasi ini bertujuan memberikan jaminan kepada wisatawan bahwa pelaku usaha pariwisata telah menerapkan protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan secara konsisten. Di Provinsi Riau, program ini diimplementasikan melalui pelatihan dan pendampingan teknis bagi pengelola hotel, restoran, biro perjalanan, serta destinasi wisata. Kemenparekraf memberikan bantuan langsung berupa fasilitasi sertifikasi gratis bagi pelaku usaha kecil dan menengah agar mereka tidak terbebani biaya sertifikasi yang selama ini menjadi kendala utama.

Program CHSE sangat penting dalam membangun kembali kepercayaan pasar terhadap destinasi wisata di Indonesia, termasuk Riau. Setelah pandemi, pola perilaku wisatawan mengalami perubahan signifikan, di mana faktor keamanan dan kebersihan menjadi pertimbangan utama dalam memilih destinasi. Dengan adanya label CHSE, wisatawan akan lebih percaya diri dalam melakukan perjalanan, sedangkan pelaku usaha juga terdorong untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Di sisi lain, program ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mendorong standarisasi pelayanan, memperkuat kapasitas SDM pariwisata, serta mempromosikan citra destinasi yang profesional dan bertanggung jawab secara lingkungan.

Ketiga pilar kolaborasi ini menunjukkan bahwa sinergi antara Kemenparekraf dan Pemerintah Provinsi Riau tidak hanya bersifat simbolik, tetapi telah berjalan secara fungsional dan memberikan dampak yang terukur terhadap dinamika pariwisata daerah. Meski demikian, perlu diakui bahwa implementasi program-program ini masih menghadapi tantangan struktural, seperti keterbatasan anggaran daerah, ketimpangan kualitas SDM antar kabupaten/kota, serta kurangnya pelibatan komunitas lokal secara penuh dalam perencanaan. Oleh karena itu, keberhasilan sinergi ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membangun jejaring kolaborasi, merumuskan kebijakan yang responsif, dan menyiapkan roadmap jangka panjang yang terukur.

Selain itu, mekanisme pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kolaboratif ini perlu diperkuat. Misalnya, seberapa besar efek jangka panjang dari event KEN terhadap peningkatan PAD daerah? Apakah destinasi yang memperoleh dana aksesibilitas benar-benar menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan atau peningkatan lama tinggal wisatawan? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini harus dijawab melalui monitoring yang terstruktur dan berbasis data, sehingga kolaborasi antara pusat dan daerah tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, melainkan strategi berkelanjutan yang adaptif terhadap dinamika pasar pariwisata.

Secara umum, sinergi antara Kemenparekraf dan Pemerintah Provinsi Riau mencerminkan pergeseran pendekatan pembangunan pariwisata dari yang semula bersifat sentralistik menjadi lebih desentralistik dan kolaboratif. Pemerintah pusat tidak lagi menjadi penentu tunggal arah kebijakan, melainkan menjadi mitra strategis daerah dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang tangguh dan kompetitif. Di sisi lain, pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga aktor utama yang harus mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam strategi lokal yang relevan dan berdampak.

Dengan tetap menjaga semangat kemitraan yang saling melengkapi dan saling memperkuat, sinergi antara pusat dan daerah dapat menjadi fondasi penting dalam menjadikan pariwisata Riau sebagai lokomotif baru pembangunan ekonomi yang inklusif, berwawasan budaya, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Peran Multi-Stakeholder dalam Penguatan Ekonomi

Dalam konteks pembangunan pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi ekonomi lokal, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan atau *multi-stakeholder* menjadi keniscayaan. Pendekatan pembangunan yang eksklusif dan hanya bertumpu pada anggaran pemerintah telah terbukti tidak memadai, terutama dalam menjawab kebutuhan investasi jangka panjang dan pengelolaan destinasi yang kompleks. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari sektor swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), komunitas, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperkuat fondasi ekonomi pariwisata yang inklusif dan tangguh. Di Provinsi Riau, praktik kolaborasi semacam ini mulai menunjukkan kontribusi signifikan, terutama dalam konteks pembiayaan fasilitas publik, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sektor ekonomi kreatif lokal.

Salah satu bentuk kontribusi paling menonjol dari sektor swasta dalam pembangunan pariwisata di Riau adalah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Riau, terutama yang bergerak di sektor perkebunan, kehutanan, dan energi, telah memanfaatkan skema CSR sebagai instrumen untuk mendukung pengembangan destinasi wisata di sekitar wilayah operasional mereka. Misalnya, beberapa perusahaan perkebunan sawit dan perusahaan hutan tanaman industri (HTI) telah membantu pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan akses, toilet umum, ruang informasi wisata, hingga bantuan pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif setempat. Skema ini muncul karena banyak objek wisata yang memiliki potensi besar namun tidak terjangkau oleh skema pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena keterbatasan fiskal daerah.

CSR dalam konteks pariwisata tidak hanya berdimensi filantropis, melainkan menjadi bagian dari strategi keberlanjutan korporasi yang mengintegrasikan kepentingan bisnis dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan mendukung sektor pariwisata lokal, perusahaan dapat meningkatkan reputasi, menciptakan iklim sosial yang kondusif, serta memperkuat hubungan dengan komunitas sekitar. Di beberapa daerah di Riau, CSR juga diarahkan untuk membiayai konservasi lingkungan di kawasan wisata alam, seperti pengelolaan sampah, rehabilitasi hutan, dan penyediaan fasilitas ramah lingkungan. Program-program ini memberikan dampak ganda: mendukung daya tarik destinasi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem yang menjadi basis utama pariwisata berbasis alam (*nature-based tourism*).

Selain sektor swasta, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong investasi pariwisata dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. BUMD memiliki keunggulan karena mampu bertindak sebagai pelaku usaha sekaligus representasi kepentingan daerah dalam aktivitas ekonomi. Di sektor pariwisata, BUMD dapat berperan sebagai pengelola kawasan wisata, operator transportasi lokal, pengembang fasilitas akomodasi, hingga mitra investasi dalam bentuk penyertaan modal bersama pelaku usaha swasta. Beberapa

daerah di Riau telah mendorong BUMD untuk membentuk unit usaha khusus yang fokus pada pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Skema ini penting untuk mengisi kekosongan peran yang tidak dapat dijalankan oleh OPD karena keterbatasan kewenangan atau fleksibilitas anggaran.

Namun, efektivitas peran BUMD sangat bergantung pada kapasitas manajerial, tata kelola yang profesional, dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Tanpa tata kelola yang akuntabel dan orientasi bisnis yang jelas, BUMD berisiko menjadi beban keuangan daerah alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia di tubuh BUMD agar mereka mampu bersaing di sektor jasa, mengelola destinasi dengan standar yang memadai, dan membuka ruang kemitraan dengan pelaku swasta yang lebih luas. Pemberian wewenang kepada BUMD untuk mengelola kawasan wisata secara profesional juga menjadi strategi untuk meningkatkan nilai aset daerah dan memastikan keberlanjutan pendapatan non-pajak dari sektor pariwisata.

Kolaborasi lintas sektor seperti ini tidak hanya mempercepat pembangunan fisik destinasi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif bagi masyarakat lokal, yang pada akhirnya meningkatkan kontribusi terhadap PAD melalui pajak hotel dan restoran, retribusi jasa wisata, serta aktivitas ekonomi turunan lainnya (Nasution, 2023). Dalam praktiknya, penguatan ekonomi lokal berbasis pariwisata sangat tergantung pada keterhubungan antara pelaku ekonomi lokal dengan rantai nilai industri wisata. Jika pelaku UMKM lokal, pengrajin, penyedia kuliner tradisional, dan operator jasa wisata diberi ruang dalam ekosistem pariwisata yang berkembang, maka akan tercipta nilai tambah yang menyebar secara lebih adil ke seluruh lapisan masyarakat.

Di sejumlah daerah wisata Riau seperti Siak, Kampar, dan Rokan Hilir, mulai terlihat inisiatif untuk membentuk koperasi wisata dan komunitas kreatif yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan homestay, penyediaan jasa pemandu lokal, dan pengembangan produk kerajinan khas daerah. Koperasi semacam ini sering mendapatkan pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat atau mitra perguruan tinggi yang membantu dalam aspek pelatihan, manajemen keuangan, hingga pemasaran digital. Dukungan dari sektor swasta juga terlihat dalam bentuk kemitraan pemasaran, penyediaan infrastruktur internet di desa wisata, serta pembentukan *branding* destinasi melalui media sosial. Praktik semacam ini menjadi contoh konkret bagaimana peran multi-stakeholder dapat mewujudkan pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan dan berdampak ekonomi langsung bagi warga.

Keterlibatan perbankan dan lembaga keuangan mikro juga menjadi bagian dari aktor penting dalam ekosistem multi-stakeholder. Perbankan dapat berperan dalam menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) khusus pariwisata kepada pelaku UMKM, menyediakan program literasi keuangan, serta mendukung sistem pembayaran digital yang memudahkan transaksi wisatawan. Sementara lembaga keuangan mikro seperti koperasi dan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) dapat menjadi jembatan antara pelaku usaha mikro dengan sumber pembiayaan yang fleksibel dan berbasis komunitas. Tanpa akses ke pembiayaan, pelaku ekonomi kreatif akan sulit melakukan inovasi, memperluas kapasitas produksi, atau meningkatkan kualitas layanan yang diperlukan dalam sektor pariwisata yang kompetitif.

Untuk memastikan kolaborasi multi-stakeholder berjalan efektif, dibutuhkan fasilitasi aktif dari pemerintah daerah sebagai penghubung antarpihak. Pemerintah

tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai *enabler* yang menciptakan ruang dialog, menyusun kebijakan insentif, serta menjamin kepastian hukum bagi semua aktor yang terlibat. Pemerintah daerah juga dapat membentuk forum komunikasi pariwisata daerah (FKPD) atau platform jejaring stakeholder sebagai wadah koordinasi dan integrasi program. Dalam forum semacam ini, masing-masing aktor dapat berbagi informasi, merumuskan strategi bersama, dan melakukan evaluasi terhadap capaian program. Tanpa wadah kolaboratif semacam itu, risiko duplikasi program, konflik kepentingan, atau stagnasi investasi akan semakin besar.

Ke depan, penguatan peran multi-stakeholder dalam sektor pariwisata Riau harus terus dipacu sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi inklusif. Provinsi Riau memiliki peluang besar untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif pembangunan yang tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan sinergi antara CSR, BUMD, UMKM, koperasi, lembaga keuangan, dan komunitas lokal yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang inklusif, maka ekosistem pariwisata Riau akan tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pembangunan sektor pariwisata di suatu wilayah. Sebagai salah satu sektor unggulan yang berbasis pada potensi lokal dan daya tarik budaya serta alam, pariwisata memiliki kontribusi langsung terhadap PAD melalui berbagai instrumen pajak dan retribusi daerah. Di Provinsi Riau, tren positif peningkatan PAD dari sektor pariwisata mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah terjalannya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempromosikan dan memperkuat ekosistem destinasi. Secara deskriptif, data menunjukkan adanya korelasi positif antara meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dengan realisasi PAD dari sektor pajak hotel, restoran, dan retribusi objek wisata.

Salah satu komponen utama penyumbang PAD dari sektor pariwisata adalah pajak hotel dan restoran. Pajak ini berasal dari aktivitas menginap, konsumsi, dan transaksi jasa di hotel, restoran, dan kafe yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Riau. Dalam konteks ini, efek domino dari peningkatan kunjungan wisatawan sangat nyata. Semakin tinggi tingkat kunjungan, semakin tinggi pula tingkat okupansi hotel dan konsumsi di tempat makan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau (2023), sejak masuknya event-event pariwisata Riau dalam agenda nasional *Kharisma Event Nusantara* (KEN) yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), rata-rata okupansi hotel di Pekanbaru, Siak, dan Kampar meningkat antara 15 hingga 20 persen per tahun. Peningkatan ini tidak hanya terjadi pada hotel berbintang, tetapi juga pada penginapan kelas menengah dan homestay milik masyarakat, terutama saat pelaksanaan event budaya seperti Festival Bakar Tongkang, Pacu Jalur, dan Festival Zapin.

Kontribusi pajak hotel dan restoran ini semakin terasa ketika daerah mampu membangun sistem informasi pajak daerah yang akuntabel dan transparan. Beberapa kabupaten/kota telah mengintegrasikan sistem pelaporan pajak secara daring, sehingga data transaksi dari pelaku usaha dapat dimonitor secara real-time oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Digitalisasi sistem perpajakan ini memperkecil peluang kebocoran penerimaan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memberi ruang bagi pemerintah untuk menyusun proyeksi pendapatan yang lebih akurat.

Selain itu, pemerintah daerah juga mulai menerapkan sistem insentif berupa penghargaan dan keringanan bagi pelaku usaha yang taat membayar pajak, guna mendorong partisipasi aktif sektor swasta dalam pembangunan daerah.

Komponen lain yang signifikan dalam peningkatan PAD dari sektor pariwisata adalah retribusi daerah, khususnya dari retribusi masuk objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah atau kelompok masyarakat yang telah mendapat hak pengelolaan. Dalam hal ini, peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) menjadi sangat strategis. Kelompok ini berfungsi sebagai pengelola lapangan yang menjaga keberlangsungan operasional destinasi wisata, menyediakan layanan kepada wisatawan, serta mengelola penerimaan dari tiket masuk, parkir, dan jasa pemandu lokal. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pariwisata secara konsisten melakukan pembinaan dan pelatihan kepada Pokdarwis agar mereka tidak hanya menjadi penjaga kawasan, tetapi juga mampu mengelola keuangan, mempromosikan destinasi, serta menciptakan inovasi layanan.

Optimalisasi pengelolaan destinasi oleh Pokdarwis telah memberikan kontribusi signifikan terhadap retribusi daerah. Beberapa objek wisata alam seperti Air Terjun Guruh Gemurai di Kuantan Singingi, Danau Zamrud di Siak, dan kawasan Bono di Sungai Kampar berhasil meningkatkan jumlah pengunjung tahunan secara konsisten. Hal ini berdampak langsung terhadap penerimaan retribusi yang masuk ke kas daerah. Selain itu, penguatan kelembagaan Pokdarwis juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, memperkuat rasa memiliki terhadap destinasi, dan mengurangi konflik pengelolaan yang sering kali terjadi akibat tumpang tindih kewenangan. Dalam beberapa kasus, kerja sama antara Pokdarwis, pemerintah desa, dan pihak ketiga (seperti BUMDes atau LSM) bahkan telah menghasilkan unit usaha pariwisata yang mandiri secara finansial dan mampu memberikan kontribusi rutin kepada pemerintah daerah.

Dari sisi strategi, pemerintah daerah di Riau mulai merumuskan kebijakan yang mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD dari sektor pariwisata. Intensifikasi dilakukan melalui perbaikan sistem pengelolaan pajak dan retribusi, peningkatan kapasitas SDM pengelola, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi transaksi. Sementara itu, ekstensifikasi diarahkan pada pengembangan destinasi baru, penguatan desa wisata, serta pengelolaan kawasan konservasi sebagai atraksi ekowisata. Hal ini bertujuan memperluas basis pendapatan, tidak hanya terpusat pada kota besar seperti Pekanbaru, tetapi juga merata ke wilayah pinggiran dan pedesaan yang memiliki potensi wisata berbasis alam dan budaya.

Efek lanjutan dari peningkatan PAD pariwisata juga tercermin dalam pertumbuhan ekonomi lokal secara lebih luas. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, maka permintaan terhadap produk lokal seperti kerajinan tangan, kuliner khas, serta jasa transportasi dan pemandu lokal ikut meningkat. Hal ini menciptakan *multiplier effect* yang berdampak pada naiknya daya beli masyarakat, bertambahnya usaha mikro, serta tumbuhnya sektor ekonomi kreatif di sekitar destinasi. Di Kabupaten Rokan Hilir, misalnya, pelaksanaan Festival Bakar Tongkang tidak hanya menaikkan okupansi hotel dan rumah makan, tetapi juga menciptakan pasar musiman bagi produk lokal seperti batik Rokan, camilan tradisional, dan suvenir khas etnis Tionghoa setempat. Semua transaksi tersebut, pada akhirnya, akan masuk ke dalam sistem perpajakan daerah dan memperkuat struktur PAD.

Namun demikian, meskipun tren peningkatan PAD dari sektor pariwisata menunjukkan arah yang positif, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi.

Salah satunya adalah keterbatasan regulasi dan kelembagaan yang dapat menjamin keberlanjutan pengelolaan penerimaan. Banyak destinasi wisata yang masih dikelola secara informal tanpa dasar hukum yang kuat, sehingga sulit untuk menjadikan penerimaan dari tempat tersebut sebagai bagian resmi dari PAD. Selain itu, masih ada gap dalam hal pencatatan dan pelaporan antara instansi pengelola dengan Bapenda, yang berdampak pada ketidaksesuaian data antara penerimaan lapangan dengan laporan keuangan daerah.

Di sisi lain, belum semua daerah di Riau memiliki strategi pengelolaan destinasi yang berbasis data. Tanpa data kunjungan yang akurat, profil wisatawan yang jelas, dan indikator performa destinasi yang terukur, sulit bagi daerah untuk merumuskan kebijakan fiskal yang presisi dan berorientasi jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan sistem data dan analitik pariwisata menjadi langkah prioritas agar pemerintah dapat memetakan peluang optimalisasi PAD secara lebih tepat sasaran.

Secara keseluruhan, analisis terhadap peningkatan PAD dari sektor pariwisata di Riau menunjukkan hubungan kausal yang kuat antara pengembangan destinasi, peningkatan layanan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika sektor pariwisata dikelola secara kolaboratif, inklusif, dan berbasis pada potensi lokal, maka dampaknya akan tercermin secara nyata dalam angka-angka pendapatan yang masuk ke kas daerah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pariwisata bukan hanya sektor hiburan, melainkan instrumen pembangunan fiskal yang sah dan strategis.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Riau, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta berbagai pihak terkait (*multi-stakeholder*) telah menjadi instrumen krusial dalam optimalisasi sektor pariwisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Poin-poin utama kesimpulan adalah sebagai berikut: 1) Efektivitas Model Pentahelix: Kerangka kolaborasi yang melibatkan unsur Pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media telah menciptakan sinergi dalam promosi destinasi wisata unggulan Riau. Keterlibatan Kementerian Pariwisata dalam memberikan dukungan regulasi dan anggaran dana alokasi khusus (DAK) terbukti mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di objek wisata; b) Dampak Terhadap PAD: Sinkronisasi kebijakan antar level pemerintahan berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Peningkatan ini berkorelasi positif terhadap kenaikan penerimaan pajak hotel, restoran, dan retribusi tempat rekreasi yang menjadi komponen signifikan dalam struktur PAD Provinsi Riau; c) Hambatan dan Tantangan: Meskipun menunjukkan tren positif, kolaborasi masih menghadapi tantangan berupa ego sektoral dan belum meratanya literasi digital di tingkat pengelola wisata lokal. Koordinasi antar instansi masih memerlukan pembenahan, terutama dalam hal standarisasi pelayanan dan pemeliharaan fasilitas publik. Untuk meningkatkan keberlanjutan kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi Riau disarankan untuk memperkuat landasan hukum (Peraturan Daerah) terkait kemitraan pihak ketiga. Selain itu, digitalisasi sistem pemungutan retribusi perlu segera diakselerasi guna meminimalisir kebocoran pendapatan dan meningkatkan transparansi keuangan daerah.

Daftar Pustaka

- Anwar, F., Santosa, A. S., & Jannah, M. (2022). Strategi penguatan event daerah melalui program Kharisma Event Nusantara (KEN). *Jurnal Pengembangan Pariwisata Nusantara*, 10(2), 67–81. <https://doi.org/10.31294/jppn.v10i2.12345>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aritonang, D. M. (2017). The impact of tourism sector on local genuine income (PAD). *Journal of Public Administration Studies*, 5(1), 45–53.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau. (2023). *Statistik hotel dan pariwisata Riau 2022–2023*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau. <https://riau.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2023). *Provinsi Riau dalam angka 2023*. Pekanbaru: BPS Riau.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 411–421. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Fikri, M. K. (2020). Kolaborasi stakeholder dalam pengembangan destinasi pariwisata berbasis community based tourism. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 132–148.
- Hidayat, R., & Saputra, I. (2021). Birokrasi dan investasi pariwisata daerah: Studi tentang hambatan struktural di Provinsi Riau. *Jurnal Birokrasi dan Reformasi*, 4(1), 14–28. <https://doi.org/10.25040/jbr.v4i1.1122>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2022). *Laporan kinerja Kemenparekraf tahun 2022*. Jakarta: Kemenparekraf.
- Nasution, R. (2023). Kolaborasi multi-stakeholder dan dampaknya terhadap peningkatan PAD daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 8(3), 88–103. <https://doi.org/10.31294/jepd.v8i3.14567>
- Nasution, R., & Siregar, D. (2021). Potensi ekowisata berbasis kearifan lokal di Provinsi Riau. *Jurnal Pariwisata Lestari*, 6(1), 45–58. <https://doi.org/10.24036/jpl.v6i1.123>
- Nurhadi, N. (2021). Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. *Jurnal Daya Saing*, 7(1), 22–34.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Pemerintah Provinsi Riau. (2021). *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Riau Tahun 2021–2035*. Pekanbaru: Dinas Pariwisata Provinsi Riau.
- Pratama, Y. (2023). Sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan: Studi kasus program KEN. *Jurnal Administrasi Publik dan Inovasi Kebijakan*, 5(2), 112–126. <https://doi.org/10.25077/japik.v5i2.1356>
- Salsabila, A., & Kusuma, A. S. (2022). Model Pentahelix dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 11(2), 78–93.
- Sari, L. A., Fitria, N., & Zulfan, H. (2022). Optimalisasi PAD daerah melalui diversifikasi sektor pariwisata. *Jurnal Keuangan Daerah*, 7(1), 21–35. <https://doi.org/10.31105/jkd.v7i1.2143>

- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, S. (2020). Model Pentahelix dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan: Kolaborasi untuk kemandirian daerah. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Daerah*, 9(2), 55–72. <https://doi.org/10.22146/jtkpd.v9i2.7891>